

DEMOKRASI DI SAUDI

Oleh Nurcholish Madjid

Sudah lama negeri-negeri Barat, khususnya Amerika, memandang segi-segi tertentu kehidupan di Kerajaan Arab Saudi dengan penghargaan secukupnya. Misalnya, dikatakan bahwa Saudi adalah “kapitalis” dalam maknanya yang positif, yaitu negeri yang menganut pola ekonomi terbuka kepada mekanisme pasar. Ditambah dengan sikapnya yang moderat dalam masalah Palestina, kapitalisme Saudi menjadi alasan utama simpati Barat kepada negeri gurun itu.

Tapi juga sudah lama masyarakat Barat mengidap stereotip yang serba-negatif tentang Saudi. Asosiasi antara orang Arab yang berhidung bengkok (Semitik) dan berigai dengan unta dan padang pasir yang gersang dan kejam selalu menjadi bumbu karikatur-karikatur ejekan kepada Arab Saudi. Asosiasi antara orang Arab dan minyak serta bagaimana minyak itu digunakan untuk tujuan-tujuan politik juga merupakan tema karikatur ejekan yang akan selalu muncul kapan saja orang Barat merasa mempunyai kesulitan dengan orang Arab.

Sebuah karikatur ejekan lagi menggambarkan seorang Arab, dengan ciri-ciri khas profil dan pakaiannya, yang sembahyang di sebelah menara pengeboran minyak. Pesannya ialah: kehadiran industri modern di Arabia tidak berhasil mengangkat penduduknya dari keprimitifan, mereka digambarkan dalam bagaimana orang Arab masih “sempat” sembahyang di tengah hiruk-pikuk mesin-mesin industri. Tetapi di mata orang yang mengerti hakikat orang

Saudi, karikatur itu dapat ditafsirkan justru sebaliknya, menjadi sebuah pujian. Bagi Robert Lacey, penulis buku laris, *The Kingdom, Arabia and the I House of Sa'ud*, misalnya, karikaturnya tersebut justru mengisyaratkan bahwa meskipun orang Arab mengalami modernisasi, mereka tetap bertahan dengan budaya mereka. Suatu hal yang baginya sungguh mengagumkan. Karena itu, dapat diharapkan bahwa apa pun yang berkembang di Saudi, termasuk sistem sosial politiknya, masih dapat dilacak sebagai kelanjutan dari tradisi dan pola budaya mereka sendiri.

Maka, ketika Raja Fahd mengumumkan rencana pembaruan politiknya dengan memberi rakyat Saudi konstitusi tertulis dan ketika menegaskan bahwa rakyat akan diberi hak lebih banyak dan lebih luas daripada yang selama ini ada, orang dapat melihatnya sebagai isyarat menuju demokrasi modern. Tetapi orang juga dapat melihatnya sebagai kelanjutan dari “demokrasi padang pasir” (*desert democracy*) hanya dalam pelembagaan baru. Sebab, betapa pun orang luar melihatnya sebagai “primitif”, “demokrasi padang pasir” memiliki unsur yang paling esensial dari sebuah sistem masyarakat demokratis, yaitu egalitarianisme.

Literatur Barat tentang Saudi selalu tidak lupa menyebutkan adanya “majlis”. Salah satunya ialah yang dituturkan oleh Robert Lacey tersebut tadi. Suatu hari di bulan Mei 1981, Raja Khalid menerima rakyatnya sebelum shalat Zuhur di istananya yang sederhana. Semua jenis manusia ada di situ: orang kota yang kaya dengan jubahnya yang berhias benang emas, kaum Badui yang telanjang kaki, orang buta, orang lumpuh, seorang pekerja asal Mesir dengan pakaian kerjanya dan kedua kakinya masih membawa lumpur dari galian selokan di kota, dan lain-lain. Mereka berebut tempat di majlis, semuanya berjumlah sekitar seratus orang. Satu per satu datang kepada Raja dan berjabat tangan dengan kukuh. Sebagian mencium pundak Raja. Sebagian lagi merangkul dan menciumnya di pipi. Tetapi ketika ada yang merunduk dan mencoba mencium tangan, Sang Raja menarik tangannya dengan cepat dan berteriak,

“*Astaghfirullah!*” lalu mengajari orang Badui itu berjabat tangan secara benar dan berdiri tegak.

Dalam suasana perjumpaan di majlis itu, kata-kata sopan kepada Raja paling jauh hanyalah “*thawil ‘umrak!*” (Semoga panjang umur!). Dan banyak dari mereka yang memanggil Raja cukup dengan nama pribadi “Ya Khalid!” Sembari melempar secarik kertas kumal ke pangkuan Raja. Kertas itu sendiri mungkin berasal dari wallpaper yang koyak. Namun, di dalamnya tertulis petisi, permohonan, keluhan, protes, atau apa saja yang dirasa perlu disampaikan langsung kepada Raja. Dan Raja memperhatikan dengan penuh kesungguhan. Biasanya, asalkan tidak berarti melanggar ketentuan birokrasi yang sudah diakui, apa pun yang menjadi isi kertas-kertas kumal itu mendapatkan tindak lanjut.

Saya pribadi menyaksikan “drama” serupa pada suatu hari di bulan Desember 1968, di masa Raja Faisal. Inilah Raja Saudi yang benar-benar berwawasan “modern”, yang antara lain dengan berani merintis adanya sekolah-sekolah untuk gadis-gadis. Dalam masyarakat yang menurut ukuran negeri-negeri Arab tetangganya pun dianggap sangat kolot, rintisan Raja Faisal adalah tindakan luar biasa, dan dia pahlawan besar Saudi. Tapi seakan untuk menegaskan egalitarianisme Arab, pemakaman jenazah Raja Faisal, yang mati secara tragis, hanya didahului dengan shalat jenazah semestinya dengan upacara penghormatan resmi seperlunya tanpa ingar bingar pemujaan jenazah Imam Khomeini. Dan kuburnya pun cukup hanya ditandai dengan batu gurun, jauh dari kemegahan mausoleum Kemal Attaturk atau Ali Jinnah.

Memandang majlis di Arabia Saudi sebagai jenis “demokrasi” seperti dikenal tentu akan terlalu jauh. Tapi Robert Lacey mengatakan bahwa majlis itu mendemonstrasikan suasana yang, amat akrab antara penguasa dan rakyat dalam gaya yang penuh kesantiaian dan rasa saling mempercayai, bahkan saling mencintai, yang semua itu tidak pernah ada di Iran pada zaman Syah. Dan jika benar demikian, maka di Saudi pun sesungguhnya terdapat fondasi sistem sosial politik yang demokratis. Tinggal bagaimana di atas

fondasi itu didirikan bangunan demokrasi modern, dengan bahan-bahan dan desain-desain yang disediakan oleh taraf pendidikan dan kemakmuran yang meningkat. Jika benar “lain lubuk lain ikan dan lain ladang lain belalang”, maka orang Saudi berhak mengembangkan “demokrasi” menurut apa yang mereka dapatkan sesuai dengan tuntutan khas budaya mereka. [❖]